

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiroeddin Sjarif, 1997, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Bagir manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi (Editor), 2005, *Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.

Pranaka dan Widyandika Moeljanto, 1996, *Pemberdayaan dan Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju*, Bandung.

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta.

JURNAL

Novianto M. Hantoro, 2012, Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.

MEDIA ELEKTRONIK

www.google.com (source engine)

Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, birohukum. bappenas.go.id/data/data_kajian/KAJIANKEDUDUKANPERATURAN.pdf. Diunduh pada 12 April 2017 pukul 19.00.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia>. Diunduh pada 12 April 2017 pukul 19.00.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094)

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 729, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4094)

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 Tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Surat Edaran Bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE-141/A/2001 dan Nomor Pol. SE/16/X/2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Anggaran Belanja Pegawai Bagi Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.